



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKARNAIN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NIK : 724866

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 774 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 513 m2/36 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 177.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1,3 G M/T MINIBUS/MP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA/FIT 1,3 (CBU JAPAN) MINIBUS/MP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. MOTOR, VESPA/P 150 X SEPEDA MOTOR R2 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA/NC11D1D SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.850.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.003.223

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.028.853.223



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.028.853.223

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.